



**Judul** : Perbanyak Kawasan Industri Daerah Dong  
**Tanggal** : Sabtu, 24 Juni 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Pemerataan Ekonomi Nasional

# Perbanyak Kawasan Industri Daerah Dong

Senayan mendukung rencana Pemerintah melahirkan banyak kawasan industri di luar Jawa. Kawasan industri ini nanti diharapkan memberi nilai tambah bagi perekonomian negara dan *multiplier effect* seluas-luasnya bagi pemerataan ekonomi di Jawa dan luar Jawa.

ANGGOTA Komisi VII DPR Bambang Patijaya menuturkan, pembangunan kawasan industri ini akan mendorong hilirisasi dan mempercepat proses industrialisasi terhadap kekayaan sumber daya alam.

Sudah saatnya Indonesia memiliki ekosistem yang mengarah

pada pengembangan kawasan nasional yang tersebar di luar Pulau Jawa.

"Kita ingin ekonomi tidak sekadar komoditas, tapi juga

berbasis pengolahan. Karena-nya, kawasan industri ini men-

Jakarta, kemarin.

Anggota Fraksi Golkar ini menuturkan, China termasuk negara yang terbilang sukses mengolah kawasan industri. Industrianya menyerupai suatu kampung penyedia bahan mentah. Ketika masuk ke pabrik besar, bahan mentah ini menjadi berbagai produk. Uniknya, limbahnya dimanfaatkan seefisien mungkin untuk memastikan tidak ada sisa dari bahan material tersebut.

"Kita ingin mendorong bagaimana menimbulkan eko-sistem *supply change* pengem-

bangan suatu produk. Jika row

material-nya adalah nikel, produksinya turunnya itu bisa dikembangkan," jelasnya.

Namun sayang, Bambang melihat, pertumbuhan kawasan industri ini belum mendukung dari sisi kebijakan fiskal. Regulasi yang ada belum mencerminkan situasi perekonomian global.

Pasalnya, Indonesia juga masuk dalam masyarakat ekonomi ASEAN.

"Kasihan Pak Menperin (Menteri Perindustrian). Kita kasih target tapi regulasi fiskal tidak mendukung," ujarnya.

Hal ini terkadang memunculkan tuduhan seakan-akan

Kemenperin tidak mengaksele-  
rasikan tumbuhnya industrialisasi.  
Padahal sebenarnya, masalah ini  
muncul dari ego sektoral antar  
kementerian/lembaga.

Dia lalu menuding kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 11 persen yang tidak pro terhadap industrialisasi.

"PPh itu sangat tidak masuk akal jika dibebankan pada barang-barang *intermediate*.

Harusnya, untuk bahan pengolaan lanjutan tidak boleh. PPh itu harus dipungut di ujung, sehingga barang-barang kita memiliki nilai kompetitif," ujar politisi asal

Bangka Belitung ini. ■ KAL